

Mahasiswa Indonesia dalam Pangung Politik

Ke arah Gerakan Rakyat?

Gerakan mahasiswa Indonesia selama ini dalam membela atau membela rakyat tampaknya selalu mendapat ganjalan. Refleksi dan munculnya kritik semakin menyadarkan mereka bahwa untuk melakukan perubahan politik perlu dibangun kerja sama lebih luas dengan kekuatan politik di luar negara. "Karakter intelektual" gerakan mahasiswa perlu segera dibongkar dan format gerakan harus dirubah supaya benar-benar menjadi sebuah gerakan massa. Dalam agenda tersebut tampaknya patut pula dipertemukan antara kondisi yang bersifat subyektif dengan makna-makna obyektif.

Bonar Tiger Naipospos

Aktivistis dan Peneliti

Panggung politik Indonesia seringkali menampilkan beberapa aktor kondang, di antaranya adalah para mahasiswa yang menjadi salah satu aktor andalan. Skenario resmi yang selama ini menjadi pakem, mencatat sejumlah lakon yang dimainkan mahasiswa, misalnya, saat berdirinya Boedi Oetomo yang dianggap sebagai tonggak kebangkitan nasional, Kongres Pemuda II yang mencetuskan Sumpah Pemuda, dan masa transisi pemerintahan tahun 1966 yang menceritakan mahasiswa tampil di lapisan depan menuntut perubahan politik. Semua memang merupakan fakta keterlibatan mahasiswa dalam sejarah politik Indonesia. Namun, perlu dicatat, peran politik mahasiswa berlainan setiap kurun waktu yang harus disesuaikan dengan dinamika masyarakat dan perpolitikan masa itu.

Sebelum 1966, kata "mahasiswa" dalam panggung politik Indonesia tidak bermakna atau bermuatan politis. Mahasiswa terjun ke dunia politik tidak menggunakan identitas mahasiswa sebagai kekuatan politik tersendiri, tetapi berafiliasi atau condong kepada sebuah kekuatan politik berdasarkan paham atau cita-cita tertentu. Kata "pemuda," yang merupakan kategori demografi, lebih menon-

Bonar Tiger Naipospos, lahir di Jakarta, 2 Agustus 1964. Pernah belajar di Jurusan Sosiologi FISIPOL-UGM. Honorary Member of International PEN, Inggris. Memperoleh penghargaan PIJAR DEMOKRASI dan Hellman/Hammett Award dari Human Right Watch, AS. Saat ini salah seorang anggota Dewan Presidium Yayasan PIJAR, Jakarta dan salah seorang organisator Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan (MIK).

jolkan konotasi politis dan terkesan bersemangat egaliter. Kata "pemuda" tidak mengandung diferensiasi berdasarkan pendidikan dan status sosial.

Kata "mahasiswa" menjadi politis setelah tahun 1966, seiring dengan terbentuknya pemerintahan Orde Baru. Mahasiswa, yang dielukan sebagai pahlawan, sejak itu mulai menganggap dirinya sebagai kekuatan kontrol sosial yang efektif.¹ Anggapan ini dianut oleh sebagian besar aktivis mahasiswa pada awal Orde Baru. Bahkan gerakan mahasiswa 1966 menjadi identifikasi peran politik bagi mahasiswa periode berikutnya.² Gerakan mahasiswa 1974 dan 1978, meskipun dalam konteks berbeda, juga tidak terlepas dari bayang-bayang keberhasilan gerakan mahasiswa 1966. Tetapi skenario "resmi" yang selama itu menjadi acuan tidak pernah sukses dipentaskan dalam panggung politik Orde Baru. Bermainnya mahasiswa sebagai kekuatan tersendiri ternyata mengisolasi dirinya dari kekuatan riil untuk melakukan perubahan. Sejak kegagalan gerakan mahasiswa 1978, praktis peran mahasiswa dalam panggung politik nasional mengalami marginalisasi.

Akhir 1980-an, gerakan mahasiswa kembali menggeliat setelah lama terlelap. Retorika populisme dan slogan keberpihakan terhadap masyarakat bawah tetap mewarnai aksi protes mahasiswa. Pengorganisasian gerakan maha-

siswa kini dilakukan dengan mengajak rakyat bawah bekerja bersama-sama. Mahasiswa tampak menyadari perlunya membangun blok perlawanan bersama rakyat bila ingin melakukan perubahan. Ada keinginan sejumlah aktivis mahasiswa untuk merubah format gerakan mahasiswa yang berkarakter intelektual menjadi gerakan massa. Bagi mereka, gerakan mahasiswa adalah bagian dari gerakan rakyat. Perbedaan dan ketegangan antara intelektual dan massa merupakan problema gerakan sosial Dunia Ketiga, mengingat latar belakang sosial dan lingkungan pergaulan intelektual (mahasiswa) yang "berjarak" dengan realitas kehidupan masyarakat bawah. Terlebih lagi Orba telah sekian lama melakukan deideologisasi dan memotong akses organisasi massa ke bawah melalui konsep massa mengambang, birokrasi, dan pengawasan aparat keamanan.³

Masa Kolonial dan Pendudukan Jepang

Berkat desakan kaum humanis dan kelompok agama di Negeri Belanda yang "prihatin" melihat praktek eksploitasi politik liberal terhadap rakyat pribumi, pemerintah kolonial Belanda mulai menyusun sebuah kebijakan yang bertujuan memperbaiki keadaan di Hindia Belanda pada awal dasawarsa 1900-an. Kebijakan yang dikenal sebagai Politik Etis itu menggunakan tiga sila yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi sebagai slogan.

Realisasi slogan edukasi adalah perluasan kesempatan bagi anak-anak pribumi untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hanya, sesuai dengan sifat diskriminatif kolonialisme, kesempatan itu terbatas bagi beberapa anak priyayi tinggi. Pada perkembangan selanjutnya, kesempatan tersebut semakin terbuka untuk golongan lain

3. Ketegangan antara intelektual dengan massa tidak sepenuhnya karena pengaruh kebudayaan dari luar melainkan berasal dari perasaan kaum intelektual sendiri yang merasa jauh dari sesama warga negara, karena berbeda kelas, kasta, dan sebagainya. Intelektual tidak secara total tercerabut dan terasing dari rakyat; lihat Edward Shills, "Cendekiawan dalam Perkembangan Politik," dalam Aswab Mahasin dan Ismet Natsir (ed.), *Cendekiawan dan Politik* (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 236-303.

1. Burhan D. Magenda, "Gerakan Mahasiswa dan Hubungannya dengan Sistim Politik: Sebuah Tinjauan," *Prisma*, No. 12, Desember 1977, hal. 13; lihat juga Masmimar Mangiang, "Mahasiswa, Ilusi Tentang Sebuah Kekuatan," *Prisma*, No. 12, Desember 1981, hal. 96. Tentang versi "resmi" gerakan pemuda dan mahasiswa Indonesia, lihat Ahmaddani G. Martha, Christianto Wibisono, Yozar Anwar, *Pemuda Indonesia: Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa* (Jakarta: Kurnia Esa, 1985).

2. Gerakan mahasiswa adalah hasil dialektika dinamis antara kesadaran subyektif dengan realitas obyektif (yang representasinya adalah dinamika struktur ekonomi-politik dan negara). Berbeda dengan kelompok sosial lainnya, kesadaran sosial mahasiswa ditentukan oleh gagasan bukan karena keberadaannya. Latar belakang sosial dan lingkungan pergaulan sebagian besar mahasiswa berjarak dari kenyataan sosial. Retorika populisme dan kritisismenya muncul bukan dikarenakan benturan dengan persoalan masyarakat sehari-hari, tetapi lebih dipengaruhi oleh pemikiran politik dan perkembangan teori pembangunan yang menjadi wacana tandingan dari kebijakan pembangunan yang ditempuh selama itu.

meskipun jumlahnya relatif kecil, karena syarat masuk yang ketat, berdasarkan seleksi jabatan, asal keturunan, kekayaan, dan pendidikan orang tua.⁴

Perluasan pendidikan moderen merubah struktur masyarakat Indonesia. Pendidikan menjadi sarana mobilitas sosial yang menembus sistem feodal-tradisional yang bersifat askriptis. Karena pendidikan dipakai sebagai kriteria pengangkatan pegawai pada instansi pemerintah maupun swasta, maka masyarakat pribumi pun memandang pendidikan sebagai kunci menuju kemajuan. Kaum priyayi rendah yang semula mempunyai kesempatan terbatas, dengan pendidikan dapat menduduki posisi tinggi dalam birokrasi dan pemerintahan.

Pendidikan juga melahirkan elit baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam stratifikasi masyarakat tradisional, yaitu golongan profesional. Perkembangan ekonomi-politik kapitalisme kolonial membutuhkan golongan ini untuk mengisi posisi di sektor swasta. Mereka bekerja atas dasar keahlian dan kemampuan, bukan berdasarkan jabatan turunturun. Didukung oleh penghasilan yang tidak berselisih jauh dengan golongan atas priyayi pribumi dan gaya hidup yang juga tidak berbeda dengan orang Barat, status sosial golongan ini terlihat meningkat dalam masyarakat.

Namun hal paling mendasar dari perluasan pendidikan adalah membuka mata pelajar tentang politik diskriminatif kolonialisme, yaitu pembedaan warna kulit, dualisme sistem ekonomi, penindasan, dan pengingkaran hak martabat manusia. Gagasan dalam pustaka yang menjadi bacaan mereka sehari-hari — antara lain tentang kebebasan, demokrasi, persamaan, dan kritik terhadap kolonialisme serta imperialisme — meningkatkan kesadaran politik dan nasionalisme kaum terpelajar pribumi.⁵

4. Lihat, Robert Van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, terj. Zahara Deliar Noer (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hal. 44. Tentang beberapa pendidikan dan perguruan tinggi, lihat Harsja W. Bachtiar, "Indonesia," dalam Donald K. Emmerson (ed.), *Student and Politics in Developing Nations* (London: Pallnall Press, 1968), hal. 180-181.

5. Lihat, J.D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta: Grafiti Pers, 1993).

Selain itu, pendidikan juga memberi pemahaman baru tentang arti organisasi dan identitas.⁶ Tentu saja tidak semua pelajar memiliki kesadaran semacam itu. Hanya sebagian kecil yang terbentuk kesadaran dirinya bahwa mereka memiliki identitas sosial yang berbeda dengan "kaum kulit putih" dan memahami arti penting organisasi sebagai penyalur aspirasi dan tuntutan. Mereka inilah embrio perlawanan terhadap kekuasaan kolonial.

Pemerintah kolonial melihat perkembangan pendidikan sebagai keberhasilan Politik Etis. Tetapi lambat-laun mereka menjadi khawatir dan menyadari efek samping pendidikan. Kekhawatiran ini dibuktikan dengan kelambanan pemerintah untuk memperluas jenjang pendidikan. Para siswa, terutama yang belajar di sekolah pemerintah, dilarang terlibat dalam kegiatan politik. Kegiatan organisasi pelajar yang diperbolehkan semata-mata nonpolitis, seperti olahraga, pengajaran, pertunjukan kesenian, dan kepanduan. Walaupun demikian, secara bertahap, organisasi pelajar akhirnya terpolitisasi, bahkan menjadi salah satu barisan terdepan kebangkitan nasionalisme Indonesia.⁷

Proses serupa terjadi pada siswa yang mendapat kesempatan belajar ke luar negeri. Selain dari kepustakaan, mereka justeru memperoleh pemahaman konkret kolonialisme dari pengalaman tinggal di negeri Barat dalam suasana yang jauh berbeda dengan negeri asal. Untuk pertama kalinya mereka dipandang sederajat dengan masyarakat Eropa, baik di depan hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Perhimpunan Indonesia (PI) dibentuk oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Negeri Belanda pada bulan Februari 1925.⁸ Kegiatan

6. M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dhamono H. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hal. 247. Pemahaman tentang organisasi mencakup pengertian bentuk kepemimpinan baru dan sarana mencapai tujuan. Sedangkan identitas meliputi analisis yang lebih mendalam tentang lingkungan agama, sosial, politik, dan ekonomi.

7. Leo Suryadinata, "Indonesia Nationalism and Pre War Youth Movement: Reexamination," dalam *Journal of Southeast Asian Studies*, 1978, hal. 100.

8. Perhimpunan Indonesia merupakan pengembangan *Indische Vereeniging* (1906) yang awalnya sekadar

kegiatan mahasiswa yang bergabung dalam PI ternyata menimbulkan reaksi pemerintah kolonial Belanda. Sebuah brosur diedarkan Kementerian Jajahan yang memperingatkan mahasiswa bahwa berpartisipasi dalam kegiatan politik atau serikat buruh akan dikenakan sanksi berupa penolakan menjadi pegawai negeri Belanda dan terkena pembatalan beasiswa. Sedangkan kepada orangtua siswa dihimbau supaya tidak mengirimkan, selain saran untuk menghentikan tunjangan, anak-anaknya ke suasana Eropa yang "tercemar".⁹

Pada tahun 1925, sejumlah pelajar sekolah tinggi (istilah untuk mahasiswa masa itu) Batavia membentuk lingkaran yang setahun kemudian berkembang menjadi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Organisasi ini mempunyai hubungan erat dengan PI. Bahkan asas dan tujuan PPPI hampir serupa dengan PI yaitu: "Berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia Raya Merdeka." Kelebihan PPPI dibandingkan dengan organisasi pemuda lain, selain tidak bersifat kedaerahan dan primordial, adalah ketegasan bergerak di bidang politik. Bahkan dalam kongresnya pada 20-23 September 1930, PPPI menyatakan berada di tengah organisasi pemuda dan partai politik.¹⁰

pusat kegiatan sosial, kebudayaan, tempat mengisi waktu senggang dan saling bertukar berita dari tanah air. PI mengedepankan masalah politik yang salah satu asasnya menyatakan "usaha untuk mencapai kemerdekaan Indonesia," lihat, Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional* (Jakarta: Gramedia, 1990), hal. xi.

9. Mavis Rose, *Biografi Politik Mohammad Hatta*, terj. Hermawan Sulistyio (Jakarta: Gramedia, 1991), hal. 43. Organisasi pemuda yang berdiri pertama kali di tanah air adalah Tri Koro Darmo (1915) yang kemudian menjadi Jong Java. Kelahiran organisasi ini berpengaruh besar dan menjadi inspirasi pemuda, terutama di kalangan pelajar, dari suku bangsa lain untuk membentuk organisasi serupa.

10. PPPI banyak mengambil bagian dalam aksi politik, seperti memprotes upacara pendirian patung Jenderal Van Heutz pada Agustus 1932, serta bersama-sama organisasi pemuda lain memprotes ordonansi *Wilde Schoolen* dan *Onderwijs Verbod*, yaitu peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk membatasi kegiatan perguruan nasional. Selain itu, PPPI juga mempunyai majalah *Indonesia Raya* yang kerap kali memuat artikel kritis. Djohan Sjahroezah, seorang pelajar Sekolah Hakim Tinggi dan figur penting pergerakan pemuda Indonesia masa kolonial

PPPI memegang peran penting mempersatukan organisasi pemuda Indonesia. Selain terlibat dalam persiapan Kongres Pemuda I, PPPI juga mengusulkan, yang diterima oleh banyak organisasi pemuda, untuk menyatukan berbagai organisasi pemuda dengan jalan fusi. Peran penting ini dimungkinkan karena umumnya anggota PPPI juga menjadi anggota organisasi pemuda lainnya.¹¹ Gagasan fusi tersebut dirintis dengan mengadakan Kongres Pemuda I bulan Mei 1926 di Batavia. Meskipun ide fusi belum mendapat kebulatan, solidaritas di kalangan pemuda Indonesia mulai terjalin. Dua tahun kemudian dilangsungkan Kongres Pemuda II yang menjadi titik sejarah baru perjuangan kaum muda, karena pada sidang terakhir diucapkan Sumpah Pemuda yang dengan tegas menyatakan berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu. Tahun-tahun berikutnya, meskipun tekanan pemerintah semakin mengeras, aktivitas pemuda tidak mengendur. Beberapa organisasi pemuda yang lahir tidak lagi diwarnai ikatan primordial, melainkan lebih mengedepankan nasionalisme dan hasrat merdeka. Organisasi-organisasi itu memainkan peran cukup penting dalam mempersiapkan kaum muda terpelajar Indonesia menyongsong alam kemerdekaan.¹²

yang mengorganisasikan buruh minyak dan pelabuhan di Cepu, Wonokromo, dan Tanjung Perak, pada tahun 1932 dihukum penjara selama 1,5 tahun karena tulisannya dalam majalah tersebut mengkritik pemerintah kolonial. Kejadian serupa terulang pada tahun 1936 ketika beberapa anggota PPPI ditangkap polisi akibat artikel yang dimuat *Indonesia Raya*. Majalah ini akhirnya "dibreidel" pemerintah kolonial; lihat, William H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak*, terj. Hermawan Sulistyio (Jakarta: Gramedia, 1989); Legge, *op.cit.*, hal. 107-115.

11. Lihat, *Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia* (Jakarta: Biro Pemuda Kementerian PP & K, 1965), hal. 47.

12. Pemerintah pada tahun 1933 mendirikan *Unitas Studiosorum Indonesiensis* (USI) sebagai organisasi tandingan yang bertujuan memecah persatuan dan membelokkan perhatian mahasiswa dari politik. USI bersemboyan pelajar sekolah tinggi sebaiknya hanya belajar, mencari ilmu, dan jangan berpolitik. Kegiatan utama USI adalah mengorganisasikan pesta dansa mahasiswa. Mungkin benar pendapat yang mengatakan tidak bisa menyamaratakan begitu saja bahwa USI adalah konservatif dan antek kolonial. Beberapa anggotanya cukup punya andil dalam perjuangan dan memegang jabatan penting dalam birokrasi pemerintahan paska kolonial.

Pendidikan betul-betul menjadi dinamis untuk kolonialisme.¹³ Sejumlah kecil elit pribumi yang memperoleh kesempatan mendapat pendidikan justru menjadi penganut keras kolonialisme dan berada di barisan depan perlawanan. Mereka kelak menjadi pemimpin bangsa dan pemerintah paska kemerdekaan. Sayangnya, gerakan pelajar masa kolonial terpisah dari gerakan perlawanan rakyat yang saat bersamaan juga sedang bangkit. Aksi pemogokan pegawai pegadaian atau buruh kereta api dan perlawanan petani di beberapa daerah,¹⁴ kenyataannya tidak berhubungan dengan para pelajar. Perlawanan massal rakyat yang pertama kali pada 1926 juga kurang memperlihatkan bukti keterlibatan pemuda terpelajar di dalamnya.

Pergerakan pemuda terpelajar mulai aktif naik ke pentas perlawanan sejak tahun 1933, setelah dilakukan serangkaian penangkapan dan pembuangan para pimpinan partai yang nonkooperasi dan berorientasi massa, seperti PKI, PNI dan PNI-Baru.¹⁵ Tetapi pergerakan itu lebih bersifat intelektual dan elitis ketimbang gerakan massa. Pemerintah kolonial pun jauh lebih represif. Boikot, mogok, dan pawai yang merupakan senjata gerakan rakyat tidak terlihat lagi.

Satu hal yang patut dicatat dari dunia pendidikan masa itu adalah, meskipun pemerintah berusaha membatasi aktivitas politik

Menurut Legge, anggota USI menganggap diri mereka liberal dalam arti luas dan bukan sebagai nasionalis dalam arti sempit. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah USI dibuat oleh kolonial Belanda sebagai imbalan PPPI, dan yang terpenting lagi, kegiatan USI boleh dikatakan nonpolitik; lihat Legge, *op.cit.*, hal. 79-80.

13. Lihat Kartodirdjo, *op.cit.*, hal. 60.

14. Sejarah kelahiran gerakan buruh dan petani di Dunia Ketiga, memang tidak terlepas dari pengaruh kaum intelektual yang mewarnai politik gerakannya. Tetapi juga hampir tidak ada bukti yang memperlihatkan gerakan pemuda pelajar dan mahasiswa pada masa kolonial berhubungan dengan gerakan rakyat; lihat Takashi Shiraishi, *An Age in Motion* (Ithaca: Cornell University Press, 1990); John Ingleson, *In Search of Justice: Workers and Unions in Colonial Java 1908-1926* (Singapore: Oxford University Press, 1986); George D. Larson, *Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kebudayaan Politik di Surakarta 1912-1942*, terj. AB Lapijan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990).

15. Larson, *op.cit.*, hal. 276.

para siswa, hubungan antara dunia akademis dengan pemerintah kolonial bersifat relatif otonom. Dalam dunia pendidikan berlaku prinsip pengajaran *concordantie-beginsel*, prinsip "mencocokkan dan menyamakan." Artinya, pendidikan di negeri koloni dicocokkan dan disamakan dalam segala hal dengan Negeri Belanda.¹⁶ Implikasinya, jiwa kebebasan dan kemerdekaan dalam pendidikan dan sistem pelajaran juga dipraktekkan sesuai dan sama dengan yang dijalankan di Negeri Belanda.¹⁷ Banyak pengajar kulit putih mengajarkan kebebasan berpikir, sikap kritis, dan keterbukaan terhadap realitas kolonialisme. Sikap liberal ini tercermin, misalnya, dari pembelaan Direktur Sekolah Tinggi Kedokteran (STOVIA) di hadapan sidang dewan guru-guru Belanda *totok* yang hendak memecat Soetomo karena kegiatan politiknya. Demikian pula ketika Soekarno ditangkap oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Para profesor dan dosen Sekolah Tinggi Hukum memprotes penangkapan itu karena dianggap tidak konstitusional; yang dilakukan Soekarno masih dalam batas-batas sah menurut hukum Hindia Belanda.¹⁸

Awal Maret 1942, balatentara Jepang menguasai kepulauan Nusantara. Maklumat pertama yang dikeluarkan adalah melarang semua kegiatan politik, termasuk membubarkan segala macam organisasi pemuda dan pelajar. Selain itu, tentara pendudukan juga menutup berbagai lembaga pendidikan tinggi. Pengajar berkebangsaan Eropa dimasukkan kamp *internir*. Selang beberapa waktu, Jepang membuka kembali Fakultas Kedokteran di Jakarta dan Fakultas Teknik di Bandung, dengan komposisi pengajar terdiri dari orang Jepang dan Indonesia.

Secara umum, kebijakan pendidikan pe-

16. Roeslan Abdulgani, "Sekolah Menengah yang Banyak Disebut dalam Literatur Dunia," dalam *Surabaya Post*, 28 Oktober 1975.

17. *Ibid.*

18. Direktur Sekolah Tinggi Kedokteran (STOVIA), Dr. FH Roll, membela Soetomo yang hendak dipecat oleh sidang guru-guru Belanda, dengan mengajukan pertanyaan: "Apa ada di antara tuan-tuan yang hadir di sini, yang tidak lebih merah dari pemuda Soetomo sewaktu tuan-tuan berumur 18 tahun?" lihat wawancara Y.B. Mangunwijaya dalam *Yogy Post*, 20 Mei 1991.

merintah Pendudukan Jepang jauh lebih represif dibandingkan dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pejabat-pejabat Jepang tidak segan memecat siswa yang tak mau menghormati bendera Jepang, apalagi buat mereka yang mencoba-coba melakukan kegiatan politik di luar sekolah. Kegiatan mahasiswa masa ini tidak banyak tercatat. Ada insiden kecil di Sekolah Tinggi Kedokteran yang mengakibatkan beberapa mahasiswa dipecat.¹⁹ Umumnya, karena mobilisasi perang yang terkendali dan represif, mahasiswa yang tertarik pada soal-soal politik hanya bisa melakukannya dengan diskusi tertutup di asrama dan mendengarkan siaran radio perkembangan perang Pasifik.

Perjuangan Kemerdekaan dan Keruntuhan Soekarno

Menghadapi Belanda yang menyusup di belakang Sekutu, sejumlah pelajar dan mahasiswa meninggalkan bangku sekolah dan ikut dalam mobilisasi milisi. Mahasiswa membentuk semacam satuan Corps Mahasiswa, sedangkan yang pelajar membentuk Tentara Pelajar yang turut bertempur bersama kaum muda lainnya.²⁰ Di pihak lain, Belanda mencoba menarik simpati mahasiswa Indonesia. Pada Januari 1946, perguruan tinggi di masa kolonial dibangun kembali menjadi Universitas Indonesia yang fakultas-fakultasnya tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dipolakan persis seperti di Belanda. Publikasi mahasiswa yang terbit berisi ajakan pesta dansa dan *drinking meeting*, tidak mengandung berita politik.²¹

19. Tentang ini lihat Aboe Bakar Loebis, *Kilas Balik Revolusi: Kenangan Saksi dan Pelaku* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), hal. 43-45.

20. Dalam buku mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia peran tentara mahasiswa tidak banyak disinggung, berbeda dengan tentara pelajar. Salah satu buku yang menceritakan sekilas tentang tentara mahasiswa adalah Suhario Padmodiwiryo, *Memoar Hari Keci: Mahasiswa Prajurit* (Jakarta: Yayasan Obor, 1995). Tentang "Revolusi Pemuda," lihat, Benedict R.O'G Anderson, *Revolusi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, terj. Jiman Rumbo (Jakarta: Sinar Harapan, 1988).

21. Harsja W. Bachtiar, *loc.cit*, hal. 183.

Respons mahasiswa yang sedang belajar di universitas terpecah ke dalam kubu pro-Republik dan apatis. Yang terakhir ini benar-benar tidak aktif secara politik. Mereka membentuk BKMI (Badan Koordinasi Mahasiswa Indonesia) yang dianggap, menurut mahasiswa pro-Republik, kolaborator dan perpanjangan tangan pemerintah kolonial. Sementara yang lain berjuang melawan Belanda, para mahasiswa yang tergabung dalam BKMI hanya sibuk kuliah menyelesaikan studi.²² Untuk membatasi pengaruh BKMI, mahasiswa pro-Republik membentuk PPMI (Perserikatan Perhimpunan-perhimpunan Mahasiswa Indonesia) di Malang pada Maret 1947. Elemen mahasiswa pro-Republik berhasil melakukan infiltrasi ke dalam tubuh eksekutif BKMI. Akhirnya BKMI lebur ke dalam PPMI sebagai satu-satunya organisasi payung seluruh mahasiswa universitas di Indonesia.

Mahasiswa berangsur-angsur mengurangi kegiatan politiknya pada awal 1950-an. Sebagian dari mereka melanjutkan karier dengan masuk partai politik, menjadi pegawai negeri atau swasta, serta melanjutkan dinas ketentaraan. Sebagian lainnya melanjutkan studi di perguruan tinggi. Perasaan merdeka, terlebih lagi hilangnya ancaman kolonialisme, membuat banyak mahasiswa lebih berkonsentrasi menyelesaikan studi. Kegiatan di luar studi hanyalah olahraga, hiburan, dan rekreasi.

Pemerintah pun segera mendirikan sejumlah perguruan tinggi di beberapa daerah untuk memenuhi keinginan sangat besar pemuda Indonesia yang hendak memasuki perguruan tinggi. Kekurangan staf pengajar sebagian diatasi dengan mempekerjakan sejumlah orang Belanda yang bersedia dan tetap tinggal di Indonesia. Kegiatan pengajaran berjalan seperti biasa, dalam arti otonomi relatif perguruan tinggi dan kebebasan akademik dipertahankan seperti pada masa kolonial.

Kesempatan masuk ke perguruan tinggi menjadi lebih terbuka, tidak lagi sebatas lapisan elit pribumi. Jumlah mahasiswa ber-

22. Andrew Gunawan, "Youth and Student Politics in Retrospect: With Special Reference to the Guided Democracy Period," dalam *Kabar Seberang*, No. 17, hal. 131.

tambah banyak ketimbang masa kolonial, meskipun rasionya tetap kecil dibandingkan dengan populasi seluruh pemuda. Posisi universitas, termasuk juga mahasiswa, pada masyarakat yang baru mengenyam kemerdekaan sangatlah tinggi. Secara sosiologis, masyarakat paska kolonial berkeinginan mengejar ketinggalan dan mempercepat laju pembangunan. Melalui pendidikan tinggilah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berguna bagi pembangunan bisa dikembangkan.

Posisi demikian membuat jabatan pimpinan universitas menjadi cukup penting. Bila disetarakan dengan struktur pemerintah daerah, maka ia sebanding dengan jabatan gubernur. Di pihak lain, pemerintah juga tidak terlalu banyak "campur-tangan" pada pengelolaan universitas, terutama dalam hal kebijakan kurikulum, kebebasan akademik, dan kegiatan kemahasiswaan. Pemerintah hanya mengatur sebatas kebijakan administrasi dan pendanaan.

Untuk pertama kalinya Dewan Mahasiswa (Dema), sebagai organisasi mahasiswa tingkat universitas, dibentuk di Universitas Gadjah Mada pada 11 Januari 1950. Pembentukan itu kemudian diikuti oleh beberapa universitas lain. Dema menjadi organisasi mahasiswa di tingkat interen kampus yang menyelenggarakan hampir semua kegiatan mahasiswa yang bersifat intrakurikuler.

Menjelang Pemilu 1955, partai-partai yang bersaing mencari pendukung melihat mahasiswa sebagai asset potensial. Parpol mulai meningkatkan kegiatan di kalangan mahasiswa dengan merintis pembentukan organisasi yang berafiliasi atau berpatron kepada mereka. PNI adalah parpol pertama yang memprakarsai pembentukan organisasi mahasiswa semacam itu pada 1952, yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Menyusul Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (GMS), berbasis di Universitas Indonesia, dibentuk oleh PSI. Organisasi lokal seperti Konsentrasi Mahasiswa Bandung (CMB), Konsentrasi Mahasiswa Jogja (CMJ), dan Konsentrasi Mahasiswa Bogor (CM Bogor) bergabung menjadi Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang kemudian dianggap pro-Komunis. Sedangkan aktivis

Himpunan Mahasiswa Islam, yang terbentuk sejak 1947, menyalurkan aspirasi politiknya pada Masyumi.

Semua organisasi itu sampai tahun 1965 sangat aktif dalam kegiatan partai yang menjadi afiliasinya, seperti: perayaan ulang tahun partai, pawai, rapat umum, kaderisasi, dan lain-lain. Keaktifan itu juga menjalar ke kampus. Mereka bersaing mencari pendukung dan anggota baru, termasuk memperebutkan jabatan strategis dalam kepengurusan interen kampus. Persaingan juga terjadi dalam memperebutkan pengaruh di tubuh PPMI sebagai organisasi persatuan mahasiswa di luar kampus dan di MMI (Majelis Mahasiswa Indonesia) yang merupakan organisasi federasi dari kepengurusan interen kampus atau Dema. Sejak tahun 1954 kampus menjadi semacam *quasi battle ground* partai-partai politik,²³ terlebih lagi didukung situasi politik masa Demokrasi Terpimpin dan gaya kepemimpinan Soekarno yang sangat diwarnai retorika politik.

Tahun 1966 merupakan momentum bagi kemunculan mahasiswa sebagai kekuatan politik. Keberhasilan menumbangkan kekuasaan Orde Lama "menyadarkan" mahasiswa tentang signifikansi peran mereka sebagai kelompok penekan dalam perpolitikan nasional. Sejak itu mahasiswa tampil sebagai dirinya sendiri, bukan membawa bendera atau *embel-embel* kekuatan politik tertentu.

Apa yang sesungguhnya terjadi dalam peristiwa 1965 dan bagaimana andil mahasiswa dalam peristiwa itu — termasuk apakah mahasiswa merupakan pelaku politik yang otonom atau digerakkan oleh kekuatan lain; dalam hal ini Angkatan Darat (AD) — sampai sekarang masih tetap menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan pengamat. Kejelasan peristiwa tersebut memang disadari sangat penting untuk pemahaman gerakan mahasiswa — selain juga untuk menghapus luka dan trauma yang begitu mendalam pada sebagian besar masyarakat Indonesia.

Tulisan ini mengambil posisi *arbitrer*, yaitu melihat posisi mahasiswa dengan AD saling-melengkapi dan koinsidensi historis. Mahasiswa, di satu pihak, melihat AD sebagai

23. *Ibid.*

kekuatan alternatif yang mampu menandingi kekuatan kiri. Sementara di lain pihak, AD melihat mahasiswa sebagai kekuatan efektif untuk kampanye anti-Soekarno dalam membentuk opini umum tentang perlunya perubahan politik. Penegasan posisi *arbitrer* diperlukan karena pendapat yang mengatakan mahasiswa hanyalah alat AD, secara implisit mengabaikan subyektivitas dan kepentingan mahasiswa. Sebaliknya, pendapat yang mengatakan mahasiswa adalah "ujung tombak" dalam peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru juga terlalu voluntaristik memitiskan mahasiswa; dengan begitu mengabaikan pergeseran arus serta dinamika di antara kekuatan sosial yang ada.

Terbentuknya kerjasama antara mahasiswa dan AD dimungkinkan karena beberapa aktivis mahasiswa yang tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) "dipengaruhi" kekuatan politik kanan-tengah Masyumi dan kiri-tengah PSI. Sedangkan sejumlah perwira AD, terutama dari Divisi Siliwangi, sudah sejak lama menunjukkan simpatinya kepada PSI. Bahkan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung secara rutin menjadi ajang bertukar pikiran antara intelektual simpatisan kedua partai tersebut dengan para perwira yang sedang belajar di sana.²⁴

Dalam hal ini, pengaruh Masyumi dan PSI bukanlah sebagai kekuatan politik riil, namun lebih kepada gagasan pembaruan dan modernisasi. Kedua partai memandang kemajuan Indonesia — demokrasi dan pertumbuhan ekonomi — hanya bisa berhasil bila menempuh jalan pembangunan ala Barat. Gagasan tersebut merupakan tandingan terhadap sistem Demokrasi Terpimpin yang berhaluan kiri — seperti antiimperialisme, antikapitalisme, sentralisme dalam demokrasi dan pembangunan ekonomi —, sekaligus meletakkan dasar ideologi oposisi terhadap kekuasaan Soekarno. Pengaruh modernisme terhadap mahasiswa, terutama yang berada di lingkungan Masyumi dan PSI, tidak hanya melalui jaringan hubungan pribadi dengan

beberapa anggota dan tokoh kedua partai itu, tapi juga melalui kedatangan beberapa pengajar yang menyelesaikan studi lanjut di Barat dan literatur paradigma modernisasi yang menjadi bacaan mereka.²⁵

Faktor lain yang tak kalah kuat pengaruhnya, disamping gagasan modernisasi, adalah memburuknya kondisi material mahasiswa. Kesukaran ekonomi seperti kenaikan harga buku, transportasi, pengobatan, sewa tempat, mahalnya uang kuliah, dan meningkatnya ongkos hidup secara umum, mempertebal perasaan tidak puas mahasiswa terhadap pemerintahan Soekarno. Gagasan rezim Orde Lama tentang nasionalisme kiri dan slogan "revolusi yang belum selesai," tidak memberi kemajuan seperti yang dibayangkan. Karenanya, untuk mengadakan perbaikan perlu dilakukan perombakan struktur politik (pergantian pemerintahan) setelah itu pembangunan bisa berjalan.

Mahasiswa Orde Baru

Setelah berhasil menumbangkan Soekarno, sebagian besar mahasiswa mengembangkan gagasan "kembali ke kampus." Mereka menganggap perjuangan mahasiswa telah sampai titik batas. Pemerintah yang baru harus diberi kesempatan memperlihatkan kerjanya. Gagasan itu berkembang seiring dengan keinginan mahasiswa untuk independen dan menghindari permainan politik. Bagi mahasiswa, pemerintah baru adalah rekan berjuang. Karena itu, pilihan gerakan mereka berpijak pada dasar moral bergaya seorang resi yang tanpa pamrih politik sama

25. Setidaknya tiga teori modernisasi mempengaruhi pemikiran cendekiawan dan mahasiswa anti-komunis saat itu: (1) hipotesa S.M. Lipset tentang korelasi positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan politik dan demokrasi; (2) hipotesa Daniel Bell mengenai berakhimya ideologi. Pembangunan lebih memerlukan langkah pragmatis dan teknis ketimbang ideologi; (3) hipotesa Samuel Huntington yang mengatakan emansipasi politik rakyat tanpa diimbangi dengan pelembagaan politik akan mengarah kepada pembusukan politik. Supaya pembangunan ekonomi Dunia Ketiga berjalan lancar diperlukan kestabilan dan ketertiban politik, karena itu partisipasi dan emansipasi politik rakyat untuk sementara perlu ditekan; lihat, Mohtar Mas'od, *Negara, Kapital, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 39-40.

24. Francois Raillon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*, terj. Nasir Tamara (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 15.

sekali. Mereka bukan satu kelompok politik yang berusaha mendapat kekuasaan, melainkan suatu kekuatan moral yang menginginkan negara mencapai cita-citanya.²⁶

Implikasi dari gagasan itu mengakibatkan hubungan antara aktivis gerakan moral dengan aktivis organisasi ekstra menjadi renggang. Aktivis gerakan moral memandang citra organisasi ekstra masih dipengaruhi pengalaman politik masa Demokrasi Terpimpin, di mana organisasi ekstra menjadi perpanjangan tangan partai politik yang bersaing mencari pengaruh dan lebih mementingkan golongannya sendiri. Berkembangnya gagasan gerakan moral, di satu pihak memang berhasil memperlihatkan citra mahasiswa sebagai sosok independen dan mendukung etos egalitarian yang diorganisasikan secara romantis dengan daya pikat populis. Di pihak lain, gerakan ini menimbulkan sikap mendua karena menjadikan mahasiswa sebagai pelopor tanpa pengikut. Terputusnya hubungan dengan organisasi politik di luar kampus membuat gerakan mahasiswa mengalami kesulitan dalam pengorganisasian di sekitar keresahan yang bersifat politik.²⁷

Hal ini terlihat jelas pada awal 1970-an. Mahasiswa melancarkan aksi-aksi bersifat spontan, setempat, dan hanya diikuti beberapa bekas tokoh mahasiswa dan pelajar yang sebelumnya turut berperan dalam peristiwa 1966. Protes-protes mereka juga lebih bersifat mengingatkan "mitra lama" tentang penyimpangan yang terjadi seperti isu pemborosan, korupsi, demokrasi, dan sandiwara politik. Mahasiswa masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah untuk dapat memperbaiki semuanya. Reaksi pemerintah pun semula toleran. Kritik mahasiswa diperhatikan meskipun praktiknya tidak banyak menunjukkan perubahan. Menanggapi protes korupsi misalnya, pemerintah secara resmi membentuk Komisi Empat beranggotakan para tokoh terkenal, seperti Mohammad Hatta dan Wilopo. Demikian pula menjelang Pemilu 1971, ketika

segelintir mahasiswa memelopori gerakan Golongan Putih. Pemerintah juga tidak melakukan tindakan represif terhadap mereka yang memprotes praktek kooptasi dan kecurangan dalam persiapan Pemilu.

Menjelang tahun 1973, saat suhu politik semakin meningkat, reaksi pemerintah pun berubah. Awal tindakan keras yang dilakukan pemerintah terjadi pada peristiwa pembangunan proyek Taman Mini Indonesia Indah, sebuah proyek raksasa dan ambisius. Beberapa pemimpin aksi protes ditangkap tanpa melalui prosedur hukum. Sejumlah surat-kabar yang dianggap turut "membakar" juga ditutup selama beberapa hari. Namun tindakan itu tidak menyurutkan aksi protes yang dilakukan mahasiswa, bahkan perlawanan mereka semakin meningkat.

Suara protes juga muncul di kalangan kampus menyoroti strategi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan pemerataan. Munculnya kritik ini dipengaruhi oleh pemikiran baru dalam teori pembangunan yang melihat kebijakan pembangunan yang menekankan peningkatan GNP tanpa memperhatikan faktor nonekonomis hanya menimbulkan persoalan kesenjangan sosial-ekonomi. Pembangunan semestinya lebih diprioritaskan pada peningkatan pendapatan rakyat bawah dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.²⁸ Pemikiran lain yang mempengaruhi intelektual dan mahasiswa adalah pandangan nasionalistis dan anti-dominasi modal asing. Pemikiran ini dipengaruhi oleh perkembangan studi pembangunan di Amerika Latin, khususnya teori-teori ketergantungan (*dependencia*), yang melihat bantuan luar negeri, investasi modal asing, dan masuknya perusahaan multinasional, tidak membuat perekonomian Dunia Ketiga menjadi maju, tetapi justru mengakibatkan ketergantungan negara Dunia Ketiga terhadap negara maju yang selama ini memberi bantuan.²⁹

28. Lihat H.W. Arndt (ed.), *Pembangunan dan Pemerataan: Indonesia di Masa Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 1983); Soedjatmoko, "Pembangunan Ekonomi Sebagai Masalah Kebudayaan," dalam *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1983), hal. 1-22.

29. Uraian ringkas Teori Dependencia lihat Bjorn Hettne, *Development Theory and The Third World* (New

26. Arief Budiman, "Mahasiswa Sebagai Intelektual," dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir, *loc. cit.*, hal. 159.

27. Magenda, *loc. cit.*

Bulan Oktober 1973 para mahasiswa mengadakan aksi ke DPR menyampaikan "Petisi 24 Oktober." Petisi tersebut menghendaki peninjauan kembali secara menyeluruh strategi pembangunan yang dipakai pemerintah. Menurut mahasiswa, strategi pembangunan itu hanya menguntungkan mereka yang kaya. Ketika Menteri Urusan Pembangunan Belanda, Jan Pronk, datang ke Indonesia dua minggu kemudian atas nama IGGI, mahasiswa menyampaikan pernyataan yang berbunyi:

[...] kami tidak merasa bangga dengan hasil-hasil bantuan luar negeri dan modal luar negeri yang diwujudkan dalam bentuk gedung-gedung dan hotel-hotel bertingkat, coca-cola, kelab-kelab malam, dan sebagainya. Sementara itu semakin banyak orang tidak punya pekerjaan dan tempat tinggal, dan tanah, dan industri kecil kami telah mati, hutan-hutan kami telah menjadi gundul, dan ladang-ladang minyak kami menjadi kering.³⁰

Intensitas gerakan mahasiswa memang semakin meningkat menjelang tutup tahun 1973. Mahasiswa telah menemukan dasar oposisi mereka terhadap pemerintah. Ditambah lagi, di dalam kampus, Dema berhasil mereduksi eksese persaingan antarorganisasi ekstra. Kesatuan semangat dalam tubuh mahasiswa semakin terlihat dan Dewan Mahasiswa muncul sebagai motor aksi mahasiswa.

Puncak aksi protes mahasiswa terjadi bersamaan dengan kedatangan PM Jepang, Kakuei Tanaka. Pada tanggal 15 Januari 1974, ketika Tanaka dan rombongan berunding dengan Presiden Soeharto dan beberapa menteri, para mahasiswa yang berkumpul di Universitas Indonesia bergerak menuju Lapangan Merdeka, jantung kota Jakarta. Dalam perjalanan jumlah demonstran bertambah, terutama dengan ikut sertanya sejumlah pelajar SLTA. Bendera-bendera penyambutan

tamu negara di sepanjang perjalanan diturunkan menjadi setengah tiang. Setelah itu, rombongan demonstran bergerak menuju kampus Universitas Trisakti. Pada saat bersamaan, di luar jalur yang dilalui demonstran dan di penjuru ibukota, terjadi aksi massa yang merusak gedung serta membakar mobil buatan Jepang. Pengusakan dan pembakaran berlangsung hingga keesokan hari. Peristiwa itu menjadi titik-balik gerakan mahasiswa. Pihak keamanan segera bertindak meredam huru-hara dan menangkap beberapa pimpinan mahasiswa, politisi, dan intelektual yang dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut. Dari sekitar 700 yang ditangkap, 45 orang tetap ditahan dan 7 surat kabar ditutup untuk selamanya. Gerakan mahasiswa 1974 atau yang kemudian dipopulerkan pemerintah sebagai peristiwa "Malapetaka 15 Januari" (Malari) dituduh ditunggangi dan dimanipulasi oleh kekuatan tertentu. Dalam keterangannya, pemerintah menyatakan bahwa demonstrasi mahasiswa semula bertujuan murni tapi kemudian diblokkan oleh PSI dan Masyumi yang menurunkan provokatornya untuk melakukan pengrusakan.³¹

Istilah "ditunggangi" kemudian menjadi istilah resmi pemerintah bagi gerakan mahasiswa berikutnya. Dengan istilah itu pemerintah seolah-olah menunjukkan kesan simpati dan terbuka terhadap kritik mahasiswa. Tapi di pihak lain, bila ada aksi yang tidak berkenan di mata pemerintah dengan segera dicap ditunggangi. Ironisnya, istilah ini menjadi beban dan trauma bagi mahasiswa yang mencoba aktif berpolitik pada periode sesudahnya.

Dalam kenyataan, gerakan mahasiswa 1974 harus diakui tidak bisa dilihat sebagai gerakan mahasiswa murni seperti yang didefinisikan oleh mahasiswa pro gerakan moral. Isu perubahan strategi pembangunan dan dominasi modal asing, dari satu sisi bisa dilihat sebagai pengaruh perkembangan pemikiran dalam studi pembangunan, tapi di sisi lain harus dilihat sebagai akibat pertentangan antara dua kelompok dalam mempe-

York: John Wiley & Sons, 1991), hal. 81-93. Untuk analisa Asia Tenggara dan Indonesia, lihat, John G. Taylor and Andrew Tunton, *Sociology of Developing Societies: Southeast Asia* (London: Macmillan, 1988); Rex Mortimer (ed.), *Showcase State: The Illusion of Indonesian Accelerated Modernization* (Sydney: Angus & Robertson, 1973).

30. Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, terj. Th. Sumartana (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hal. 351.

31. B. Wiwoho dan Banjar Chaerudin, *Memori Jenderal Yoga* (Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 1990), hal. 219-251.

rebutkan pengaruh di sekitar presiden. Kelompok pertama adalah mereka yang pro pembangunan model Amerika atau liberal, yang terdiri dari para teknokrat dan Bappenas. Kelompok kedua adalah mereka yang setuju dengan pembangunan sektor masyarakat melalui simbiosis dengan negara seperti model ekonomi Jepang dan memilih model kapitalisme birokratis ala Pertamina. Kelompok terakhir ini terdiri dari beberapa asisten pribadi presiden. Tentu saja, di samping perbedaan pilihan teori dan strategi pembangunan tersebut, faktor paling mendasar dari pertarungan itu adalah rivalitas politik.³²

Terlepas dari rivalitas politik dan berkembangnya pemikiran alternatif, apa yang ditulis mingguan *Mahasiswa Indonesia* yang terbit di Bandung beberapa waktu sebelum meletus Malari, tampaknya perlu disimak untuk mendapat gambaran mengapa gerakan mahasiswa memuncak dan berpisah dengan "mitra" lamanya:

Proses penipisan kepercayaan terhadap rezim yang dinamakan orde baru ini dalam waktu relatif singkat, [...] banyak dipercepat oleh kenyataan yang telanjang di mata masyarakat yaitu betapa lingkungan Soeharto terdapat banyak orang yang patut disangsikan jikad baiknya ataupun kejujurannya atau kemampuannya. [...] Terlalu banyak akomodasi yang mereka lakukan dengan oknum-oknum yang berorientasi kepada filsafat mumpung dan lebih banyak mengingat bagaimana mempertahankan kekuasaan semata.³³

Untuk beberapa lama setelah peristiwa Malari, mahasiswa mengidap semacam trauma politik. Pemerintah kemudian mengeluarkan Surat Keputusan 028/1974 yang melarang kegiatan-kegiatan bersifat politik di kampus. SK itu menetapkan pula bahwa pimpinan perguruan tinggi bertanggungjawab sepenuhnya atas segala sesuatu yang berlangsung di kampus. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa harus diketahui dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi, termasuk program kerja dan rapat organisasi mahasiswa.

32. Raillon, *op.cit.*, hal. 115; lihat juga, Heru Cahyono, *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980* (Jakarta: Sinar Harapan, 1992).

33. Raillon, *op.cit.*, hal. 107.

Peraturan tersebut jelas membatasi ruang gerak politik mahasiswa. Sepanjang 1974-1976, berita-berita kegiatan kampus di media massa hanya berkisar kuliah kerja nyata (KKN), wisuda sarjana, dan bakti sosial mahasiswa. Menjelang pertengahan 1976, muncul aksi protes mahasiswa terhadap SK 028/1974, yang membuahkan hasil pemerintah mencabut SK itu. Hanya, patut diingat, pencabutan itu terjadi menjelang Pemilu 1977 dan Sidang Umum MPR 1978. Pemerintah tentunya sangat berkepentingan menarik simpati dan mendapat legitimasi dari mahasiswa.

Suhu politik nasional, terutama selama kampanye Pemilu 1977, kembali memanas. Belum lagi ditambah krisis Pertamina, pengadilan Sawito, kelaparan di Krawang, dan protes kaum muslim terhadap kecurangan pemerintah; semuanya membentuk ketidakpuasan dan ketidakpercayaan mahasiswa. Tetapi gerakan mahasiswa 1978 berbeda dengan gerakan mahasiswa 1974 dari sisi dukungan. Gerakan mahasiswa 1978 tidak mempunyai pendukung nyata di kalangan cendekiawan, militer, dan pemerintahan. Meskipun demikian mahasiswa tetap berupaya menampilkan citra sebagai gerakan moral yang tidak mempunyai kepentingan politik dan keengganan untuk ditunggangi.³⁴

Isu utama yang disuarakan mahasiswa adalah mengenai pembaruan struktur politik. Pemerintah dituduh telah menyimpang dari UUD 1945 dan Pancasila. Mahasiswa mempertanyakan praktek politik pemerintah yang inkonstitusional, anggota parlemen yang dipilih pemerintah, kecurangan pelaksanaan Pemilu, sampai pemilihan gubernur

34. Menurut seorang Indonesianis, ada dua komponen dalam pemikiran politik gerakan mahasiswa 1978. Pertama, kerakyatan atau populis, dan kedua *regularize* (keteraturan). Komponen pertama lebih merupakan suasana perasaan terhadap apa yang tidak disukai dari politik Soeharto ketimbang sebuah kritik. Gagasan-gagasannya datang dari Ivan Illich, Andre Gunder Frank, Mahbub Ul Haq, Julius Nyerere, dan E.F. Schumacher. Sedangkan komponen kedua berasal dari gagasan bersifat liberal yang ingin melihat kapitalisme di Indonesia berlangsung lancar dan modernisasi berjalan terus; tapi diganggu oleh korupsi, nepotisme, hak istimewa militer, dan lain-lain; lihat, Herbert Feith, "Gerakan Mahasiswa Tahun 1977-1978," makalah yang tidak diterbitkan.

dan bupati di daerah.³⁵ Dari sudut ini, sebetulnya layak dikatakan gerakan mahasiswa 1978 bermain politik, walaupun mereka mengatakan sebagai gerakan moral yang tidak berkepentingan kekuasaan. Awal Januari 1978, secara terbuka mahasiswa menolak terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 1978-1983.³⁶ Untuk menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap lembaga legislatif yang tak lebih sebagai perpanjangan tangan eksekutif, mahasiswa mendatangi dan "menduduki" parlemen seraya menyatakan diri sebagai parlemen jalanan.

Di kalangan mahasiswa saat itu, ada semacam keinginan agar "keributan politik" yang mereka ciptakan dapat dimanfaatkan oleh kekuatan politik oposisi untuk melakukan perubahan. Mengenai siapa yang tampil dan muncul sebagai "pemenang" terserah konstelasi politik luar kampus. Yang jelas, mahasiswa tidak menaruh kepercayaan pada partai politik. Keinginan ini ternyata sia-sia. Tidak muncul kelompok atau kekuatan yang diharapkan, sampai akhirnya pemerintah bertindak keras. Kampus yang menjadi basis kegiatan politik mahasiswa diserbu.³⁷ Beberapa pemimpin mahasiswa ditangkap dan diajukan ke pengadilan. Selain itu, beberapa tokoh masyarakat, seniman, dan ilmuwan turut ditangkap, namun kemudian dibebaskan tanpa proses pengadilan.³⁸

35. Tentang perbedaan gerakan mahasiswa 1974 dan 1978 dalam melihat ketimpangan sosial, penyelewengan, dan "sumber" keresahan; lihat, Mangiang, *loc.cit*, hal. 102.

36. Lihat, Hariyadhie, *Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 Dalam Percaturan Politik Nasional* (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1994), hal. 82.

37. Gerakan mahasiswa 1978 sangat berhati-hati dan lebih banyak melakukan aksi di dalam kampus, seperti: mimbar bebas, pembacaan puisi, malam keprihatinan, apel siaga, dan lain-lain. Bentuk aksi ini dipilih untuk menghindari kemungkinan terjadinya provokasi dan manipulasi seperti yang dialami gerakan mahasiswa 1974. Kalaupun mahasiswa turun ke jalan, barisan demonstran diatur sedemikian rupa untuk mencegah menyusupnya "oknum" yang bisa menyusul massa bertindak beringas. Itu sebabnya mengapa akhirnya kampus diserbu secara brutal, karena melihat gerakan mahasiswa 1978 tidak terpancing keluar kampus dan melakukan kesalahan seperti 1974; lihat Feith, *loc.cit*.

Untuk mencegah bangkitnya gerakan mahasiswa, pemerintah menerapkan kebijakan normalisasi kehidupan kampus (NKK) yang merupakan pengembangan SK 028/1974. Sasarannya adalah melumpuhkan Dewan Mahasiswa yang sejak tahun 1970-an menjadi penggerak aksi protes mahasiswa dan "membersihkan" kegiatan politik di kampus. Mahasiswa menolak dan menentang kebijakan NKK. Bagi mahasiswa, kebijakan NKK adalah rekayasa untuk menjauhkan mereka dari kepekaan sosial dan kepedulian terhadap nasib kaum lemah. Namun "lawan" mahasiswa di garis depan bukan lagi pemerintah, melainkan birokrasi kampus yang tidak segan-segan menjatuhkan sanksi akademis dan memecat mahasiswa yang "bandel." Di lain pihak, kehilangan kesempatan belajar di perguruan tinggi secara tidak langsung berarti kehilangan masa depan yang baik. Persaingan dan menyempitnya daya tampung tenaga kerja mengurangi rasa aman dan harapan mereka akan mendapat pekerjaan apabila sudah lulus. Akhirnya, perlawanan mahasiswa berangsur-angsur menurun terhadap penerapan NKK.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah perguruan tinggi di Indonesia pemerintah mengambil alih pengawasan seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bagi pemerintah, kampus adalah miliknya. Selain menentukan kebijakan kampus, termasuk menetapkan siapa yang menduduki posisi birokrasi kampus, pemerintah juga berhak mengamankannya bila ada indikasi yang dianggap mengancam kestabilan dan pembangunan nasional.³⁹ Akibatnya, perguruan tinggi tidak lagi relatif mandiri, melainkan subordinasi di bawah kendali negara. Intervensi negara membuat kehidupan perguruan tinggi tidak lagi ditentukan oleh rasionalitas dan tradisi kebebasan akademis, tetapi ditentukan oleh kepentingan negara. Perguruan tinggi menjadi bagian dari reproduksi sistem ekonomi-politik kapitalisme yang sedang berjalan. Ia dilihat semata sebagai pabrik untuk melatih tenaga kerja, sementara maha-

38. *Ibid*; Hariyadhie, *op.cit*, hal. 103.

39. Wolfgang Karcher, *Higher Education In Indonesia-Challengers and Perspectives* (Berlin, 1984), hal. 20.

siswa sebagai atau sekrup yang akan mengisi sistem produksi tersebut.

Gerakan Mahasiswa Paska NKK

Kehidupan kampus di seluruh Indonesia terlihat sepi dari kegiatan politik pada awal 1980-an. Dinamika politik mahasiswa yang sangat menonjol di tahun 1970-an menghilang dari kampus. Secara umum kegiatan mahasiswa yang masih berjalan adalah bersifat akademik dan rekreatif. Namun beberapa mahasiswa mencoba menyuarakan kritik politiknya yang tercermin dari lontaran pendapat atau pertanyaan dalam diskusi di kampus. Tetapi upaya mengalihkan kritik ke dalam bentuk aksi protes tidak mendapat saluran, karena tidak adanya organisasi mahasiswa atau Dewan Mahasiswa. Padahal organisasi itulah yang dalam periode sebelumnya memiliki kemampuan memobilisasi mahasiswa dan memperbesar gaung protes. Kalau pun muncul aksi-aksi di beberapa kampus, isu yang muncul tidaklah menyangkut politik melainkan persoalan sehari-hari seperti protes terhadap kenaikan uang kuliah, kualitas dosen, fasilitas pengajaran, dan lain-lain.

Awal 1980-an memang merupakan masa sulit bagi gerakan mahasiswa. Birokrasi kampus, yang merupakan representasi intervensi negara Orde Baru, mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan mahasiswa di dalam kampus. Mereka mengeliminasi kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan politik dan pengerahan mahasiswa. Infrastruktur politik mahasiswa seperti Dewan Mahasiswa, perpeloncon, dan pers kampus dihapuskan atau diubah fungsinya; tidak lagi mandiri di tangan mahasiswa.

Kendala lain yang juga sangat signifikan terhadap kemunduran politik mahasiswa adalah realitas obyektif eksternal, yaitu kondisi politik di luar kampus. Bila dinamika gerakan mahasiswa ditelusuri, terutama pada masa Orde Baru, aksi protes mahasiswa sedikit banyak berhubungan dengan persaingan politik di tingkat elit. Gerak-gerik politik kelompok oposisi mampu merangsang minat politik mahasiswa. Konflik yang semakin meningkat terlihat membuka kemung-

kinan bagi mahasiswa untuk terlibat. Sebaliknya, apabila kekuatan oposisi berhasil dikendalikan atau dipatahkan, itu berarti sekaligus mematahkan rangsangan yang dapat meningkatkan aspirasi politik mahasiswa. Dalam konteks kemunduran politik mahasiswa paska 1978, menguatnya peran pemerintah sebagai pelaku dominan dalam percaturan politik serta melemahnya kekuatan oposisi membuat kekuatan politik mahasiswa turut menjadi lemah. Hal ini masih ditambah dengan menurunnya dukungan media-massa yang sebelumnya memberi liputan cukup luas bagi aksi-aksi mahasiswa.

Melihat ruang gerak di kampus yang semakin terbatas, sejumlah mantan dan aktivis mahasiswa kemudian mencari format baru yang memungkinkan mereka tetap dapat mengartikulasikan aspirasi politik. Mereka mengalihkan kegiatan ke luar kampus. Beberapa di antara mereka membentuk organisasi sosial yang disebut Organisasi Non-Pemerintah (Ornop), sedangkan sebagian yang lain membentuk Kelompok Studi (KS). Dua faktor yang mendorong sebagian aktivis mahasiswa paska 1978 memilih dan membentuk Ornop adalah *pertama*, sebagai jawaban atas pencarian strategi atau model pembangunan alternatif yang lebih menekankan pemerataan, partisipasi masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan pokok.⁴⁰ *Kedua*, untuk menanggapi kritik yang mengatakan gerakan mahasiswa bersifat elitis, jauh dari persoalan nyata masyarakat, dan lebih berorientasi pada tema-tema besar dan abstrak seperti keadilan, demokrasi, korupsi, dan lain-lain. Faktor terakhir ini berkembang setelah beberapa aktivis mengevaluasi dan mengidentifikasi kelemahan gerakan mahasiswa periode sebelumnya, khususnya gerakan mahasiswa 1978, yang tidak mendapat dukungan riil rakyat banyak.

Namun demikian, berkiprah dengan Ornop ternyata tidak semudah yang diidealisasikan. Ornop menghadapi persoalan cukup kompleks dan keberadaannya dalam "dunia nyata" justru membuat mereka tidak leluasa berpolitik secara langsung. Pe-

40. Philip Eldridge, "LSM dan Negara," dalam *Prisma*, No.7, Thn. XVIII, 1989, hal. 33-39.

merintah tidak mentolerir kegiatan politik yang dapat mengumpulkan dan menimbulkan gejolak massa. Belum lagi jaringan birokrasi dan aparat keamanan yang menerebos sampai ke tingkat pemerintahan paling rendah, dan mengawasi semua aspek kehidupan sosial. Karena itu sebagian besar Ornop cenderung memilih profil yang menekankan watak nonpolitik serta berorientasi peningkatan sumber daya ekonomi dan pengetahuan rakyat akan pemecahan persoalan-persoalan teknis.⁴¹

Persoalan hampir serupa juga dialami oleh mereka yang aktif dalam KS. Kelompok-kelompok ini memang cukup intens dalam mengkaji isu-isu sosial-politik aktual. Diskusi-diskusi yang diselenggarakan bukan hanya mengenai masalah pembangunan dan teori-teori politik, tetapi juga membahas posisi dan peran mahasiswa dalam masyarakat serta perubahan politik.⁴² Bentuk KS sempat *trend* dan menjamur di banyak kota, khususnya di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta, tiga kota besar yang secara historis menjadi basis gerakan mahasiswa. Tetapi sayangnya kegiatan diskusi sebagian besar dilakukan di ruang tertutup dan lebih bersifat *exercise* serta teoritik belaka. Kritik tajam yang muncul praktis hanya berputar dan bergema di kalangan mereka. Masih sedikit yang berkeinginan mempraktekkan pemahaman teori mereka terhadap realitas masyarakat. Meskipun demikian, kemunculan KS tetap mempunyai manfaat. Diskusi dan pembicaraan yang selama itu mereka lakukan menjadi

dasar bagi pemikiran politik aktivis mahasiswa yang "menjalankan" aksi-aksi protes di penghujung 1980-an, bahkan beberapa pelopor gerakan mahasiswa periode itu berasal dari KS.⁴³

Generasi mahasiswa 1980-an (juga 1990-an) jelas banyak belajar dari "kegagalan" gerakan mahasiswa sebelumnya. Mereka tidak lagi memitoskan diri sebagai satu-satunya kekuatan oposisi yang efektif dan mampu melakukan perubahan. Mereka adalah bagian dari sebuah kekuatan yang lebih besar yaitu kekuatan rakyat.⁴⁴ Mereka menyadari bahwa perubahan politik tidak mungkin terjadi bila tidak ada dukungan rakyat. Karakter gerakan mahasiswa bersifat intelektual, sehingga untuk mampu mendorong proses perubahan politik perlu bekerjasama dengan massa rakyat yang menjadi "pemukulnya."⁴⁵ Dalam hal ini mereka mendapat inspirasi dari pengalaman negaranegara seperti Iran, Filipina, dan Korea Selatan, di mana kekuatan rakyat menjadi faktor signifikan bagi perubahan politik.

43. Mereka adalah anggota KS yang melakukan otokritik terhadap kegiatan berteori semata yang dilakukan rekan-rekannya. Bagi mereka sudah waktunya mahasiswa tidak hanya sekedar melakukan aktivitas berteori tapi mempraktekannya untuk perubahan. Kritik tajam terhadap keberadaan KS, lihat M. Fauzi dan Petrus Adrianus, "Awal Pembentukan Studie Club," makalah yang disampaikan dalam diskusi Mencari Orientasi Kelompok Studi, yang diadakan oleh Kepodang, Politika-UNAS, dan YSM, Jakarta 27 Desember 1987.

44. Mitos dan slogan bahwa mahasiswa adalah *the only effective opposition* lihat Magenda, *loc.cit.*

45. Di kalangan aktivis mahasiswa akhir 1980-an dan awal 1990-an muncul istilah "bunuh diri kelas." Istilah ini tidak jelas asal-muasalnya. Dalam kepustakaan analisa kelas, istilah ini juga tidak diketemukan; lihat Tom Bottomore *et al.*, *A Dictionary of Marxist Thought* (Cambridge: Harvard University Press, 1983). Secara harfiah istilah ini mengacu pada pengertian bahwa mahasiswa yang latar belakang sosialnya berasal dari kelas menengah, apabila hendak berjuang bersama rakyat harus meninggalkan karakter borjuis kecil yang individualisme, cenderung mempertahankan kemapanan, takut pada revolusi, dan mendukung negara yang kuat serta rezim penguasa; lihat Nicos Poulantzas, "Kelas-kelas Sosial," dalam Anthony Giddens dan David Held, *Perdebatan klasik dan Kontemporer mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*, terj. Vedi R. Hadiz (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hal. 55.

41. Pertengahan 1980-an muncul kritik tajam terhadap praktek atau cara kerja Ornop. Sasarannya tertuju terutama kepada Ornop-ornop besar (BINGO: Big NGO). Kritik itu berkisar tentang ketergantungan Ornop terhadap bantuan asing, alokasi *budget* yang lebih besar untuk gaji aktivis Ornop dan institusi ketimbang proyek dan masyarakat yang dibantu, sikap konservatif, akomodatif, dan apolitis dari Ornop apabila menghadapi kebijakan pemerintah.

42. Edward Aspinall, *Student Dissent in Indonesia in The 1980s* (Victoria: Monash University working papers, 1993), hal. 14. Perdebatan mengenai gerakan mahasiswa terfokus pada tiga persoalan. *Pertama*, apakah gerakan mahasiswa gerakan moral atau gerakan politik. *Kedua*, pilihan bentuk aksi, apakah aksi informasi atau aksi massa. *Ketiga*, apakah gerakan mahasiswa bersifat independen atau bergabung dengan kekuatan lain.

Rezim-rezim otoriter yang berkuasa selama bertahun-tahun ternyata bisa ditumbangkan oleh gelombang perlawanan rakyat.

Pemikiran itu juga berkembang karena pengaruh pustaka teori pembangunan alternatif yang beredar di kalangan aktivis mahasiswa. Setidaknya ada tiga kelompok teori yang mempengaruhi pemikiran politik mereka. *Pertama*, pendekatan struktural-historis yang melihat kapitalisme dan dominasi negara sebagai penyebab proletarianisasi rakyat dan otoritarianisme. *Kedua*, pendekatan populisme-kritis yang menentang pemusatan kekuatan politik-ekonomi dan penyeragaman pemikiran. *Ketiga*, perkembangan teori-teori Islam alternatif.⁴⁶ Ketiga kelompok teori ini menjadi "narasi besar" kebanyakan aktivis mahasiswa dalam upaya memecahkan persoalan rakyat. Meskipun kelompok-kelompok teori tersebut berbeda dalam epistemologi keilmuan yang mendasarinya, tetapi ketiganya sangat menekankan pada upaya memperjuangkan kepentingan dan membangun kekuatan rakyat.⁴⁷

Menjelang akhir 1980-an sejumlah aksi protes mahasiswa muncul di kampus-kampus beberapa kota. Mulanya aksi-aksi tersebut mengangkat isu yang berkaitan dengan persoalan internal kampus atau isu yang tidak berkaitan langsung dengan politik.⁴⁸ Beberapa pengamat, melihat kecenderungan tersebut, sempat menganggap sebagai pertanda bahwa masa politik mahasiswa sudah berakhir. Mahasiswa kini hanya mengurus kepentingannya sendiri.⁴⁹ Tetapi tidak lama

kemudian mahasiswa mulai mengalihkan isu protes dari persoalan internal kampus ke persoalan-persoalan sosial.

Boleh dikatakan menggeliatnya gerakan mahasiswa tidak terlepas dari dukungan pers mahasiswa yang saat bersamaan juga mulai bangkit. Sebelumnya, beberapa kampus mulai melakukan pembenahan yang disebut reorganisasi pers mahasiswa. Pers kampus tidak lagi menjadi bagian dari struktur Senat Fakultas, tetapi mempunyai hubungan langsung dengan birokrasi Rektoriat.⁵⁰ Posisi baru ini cukup unik karena memungkinkan fasilitas pers mahasiswa dimanfaatkan untuk ajang berkumpul banyak aktivis di kampus. Komunikasi antara aktivis Ornop, aktivis KS, dan aktivis pers mahasiswa terlihat berjalan semakin intens. Selain itu, dalam latihan pendidikan jurnalistik mahasiswa atau diskusi yang diselenggarakan oleh pers mahasiswa, para aktivis Ornop dan KS kerap diundang sebagai pembicara atau peserta. Demikian pula ketika dilakukan pertemuan antara pengurus pers mahasiswa dari berbagai kampus. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh beberapa aktivis untuk bertemu dan bertukar pikiran. Dari sinilah embrio jaringan perkawanan antaraktivis berbagai kota terbentuk.

Meskipun masih berada dalam skala kecil, gerakan mahasiswa mencoba bangkit kembali. Penggeraknya adalah tiga komponen: aktivis mahasiswa yang aktif di Ornop, KS, dan pers mahasiswa. Dalam mengorganisasikan aksi tersebut mahasiswa menggunakan nama "Komite" sebagai identitas, sekaligus sebagai identifikasi persoalan yang mereka protes; selain juga untuk meng-

46. Anders Uhlin, *Democracy and Diffusion: Transnational Lesson-Drawing among Indonesia Pro-Democracy Actors* (Sweden: Lund Political Studies 87, 1995), hal. 111-116; Max Lane, "Students on the Move," dalam *Inside Indonesia*, No. 19, hal. 10-13. Tentang perkembangan pemikiran teori Islam alternatif di Indonesia, lihat Fachry Ali dan Bahtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1986).

47. Lihat Aspinall, *op.cit.*, hal. 22.

48. Untuk aksi protes yang dilakukan selama periode 1986-1989; lihat, *Tempo*, 14 Mei 1988; *Panji Masyarakat* No. 577, 1-10 Juni 1988; *Jakarta-Jakarta*, 9 April 1989; Surat kabar *Manunggal*, Semarang, Oktober 1989.

49. Urusan mereka bukanlah urusan-urusan besar, atau juga masalah nasional, melainkan urusan yang lang-

50. Dua penerbitan pers mahasiswa yang memberi kontribusi berarti bagi gerakan mahasiswa akhir 1980-an adalah *Balairung*, majalah terbitan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan majalah *Politika* terbitan Universitas Nasional, Jakarta. Keduanya lahir atas inisiatif mahasiswa yang kemudian mendapat lampu merah dari Rektor. Kedua terbitan inilah yang menjadi motor pertemuan pers mahasiswa tingkat nasional yang tujuannya adalah mendirikan satu wadah dan organisasi bersama.

hindari tekanan pihak universitas yang tidak membolehkan mahasiswa aktif di luar kampus dengan menggunakan nama kampus.

Gerakan Rakyat: Embrio Perubahan?

Sampai pertengahan 1990-an, aksi protes mahasiswa secara beruntun tetap muncul. Isu yang diangkat, secara umum, berada dalam dua tataran. *Pertama*, mengenai demokratisasi dan hak asasi manusia. Isu ini berkaitan dengan persoalan kelas menengah perkotaan yang menginginkan terciptanya *good governance*, kebebasan berpendapat dan berserikat, adanya kepastian hukum, serta kelancaran pembangunan. Sedangkan tataran *kedua*, adalah mengenai tanah, lingkungan hidup, dan perburuhan. Yang terakhir ini lebih berkait dengan kepentingan konkret rakyat bawah, khususnya kaum marginal perkotaan dan petani pedesaan; massa rakyat yang diinginkan untuk membangun blok perlawanan bersama.

Idealisasi gerakan mahasiswa tahun 1990-an adalah berjuang bersama rakyat. Bagi mahasiswa, rakyatlah yang paling berhak menjadi aktor dan penentu perubahan, terutama karena sesungguhnya perubahan itu untuk kepentingan rakyat. Selama ini rakyat hanya menjadi korban dari kepentingan yang dibungkus atas nama "pembangunan." Karena itu perlu ada pembaruan sosial untuk memperbaiki nasib rakyat. Dalam pengorganisasian aksi, mahasiswa berada di lapisan belakang dan sekadar "mitra" atau pendukung. Rakyatlah yang tampil di depan memperjuangkan tuntutan sendiri. Hal ini sekaligus melatih rakyat agar mampu berorganisasi dan tahu memperjuangkan aspirasi. Depolitisasi dan deideologisasi telah memporak-porandakan organisasi dan potensi resistensi rakyat. Karena itu, memulihkan dan membangkitkan kepercayaan diri rakyat agar mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak individu dan sosialnya menjadi salah satu tujuan gerakan mahasiswa.

Perlahan namun pasti pergeseran gerakan mahasiswa sedang terjadi dari yang bersifat intelektual ke bentuk gerakan massa. Memang masih terlalu dini mengatakan bahwa

ini adalah format baru gerakan mahasiswa. Namun jelas, untuk melakukan perubahan perlu bekerjasama dengan kekuatan politik di luar negara dan massa rakyat yang tereksplorasi. Karena itu, mereka terjun langsung ke "daerah konflik" mendampingi dan mengorganisasi rakyat melakukan protes sosial. Hanya saja usaha serius untuk mempraktekkannya baru terlihat pada sebagian kecil aktivis mahasiswa, dan khususnya mereka yang aktif dalam Ornop kecil tapi progresif.⁵¹ Sebagian yang lain tetap berkecimpung dan mengorganisasi mahasiswa di kampus dan mencoba membentuk jaringan antarkota. Meskipun demikian, ini merupakan indikasi yang positif. Catatan sejarah memperlihatkan, minat mahasiswa yang aktif terlibat dalam kegiatan sosial-politik secara kuantitatif kecil pada awalnya. Gelombang gerakan mahasiswa baru membesar seiring dengan munculnya momentum historis.

Maraknya kembali aksi protes mahasiswa belakangan ini, tanpa mengabaikan subyektivisme politik mahasiswa, didorong oleh dua hal. *Pertama*, karena pergeseran politik di tingkat elit dan bermunculan faksi-faksi yang bersaing serta berusaha mencari akses ke tengah massa dalam kerangka suksesi. *Kedua*, liberalisasi politik sampai tingkat tertentu mendapat peluang karena semangat internasional paska Perang Dingin yang menekankan penghargaan terhadap hak asasi, lingkungan hidup, dan demokratisasi. Lepas dari itu, gerakan mahasiswa paska NKK menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan gerakan mahasiswa sebelumnya. Pragmatisme dan deideologisasi yang ditanamkan membuat mayoritas mahasiswa tidak peduli terhadap persoalan sosial-politik di sekitarnya. Itulah sebabnya, harus diakui secara kualitatif dan kuantitatif gerakan mahasiswa dewasa ini belum memperlihatkan peningkatan berarti, meskipun sebagai embrio resistensi sosial adalah prospektif.

Pada tahun 1992 pemerintah mengintro-

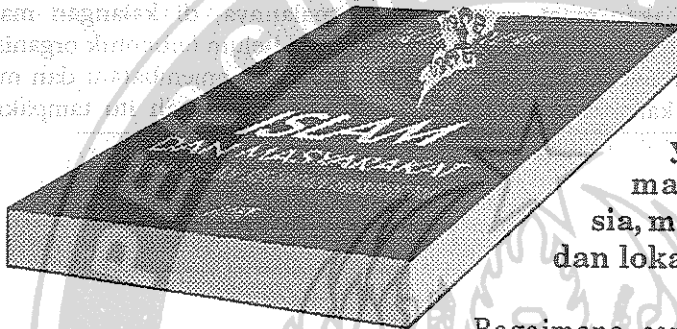
51. Lihat, George Aditjondro, "Aksi Massa dan Pendidikan Masyarakat Hanyalah Dua Aspek Gerakan Kaum Terpelajar di Indonesia," dalam *Kritis*, Vol. 5, No. 3, hal. 87-104.

disur berdirinya Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), suatu bentuk organisasi interen kampus di tingkat universitas yang semi independen. Tidak sulit ditebak apa sebenarnya keinginan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan tersebut. Ini hanya semacam *hidden agenda* untuk menarik mahasiswa kembali ke kampus dan memotong kemungkinan aliansi mahasiswa dengan kekuatan luar kampus. Bagi pemerintah lebih mudah mengatasi dinamika politik mahasiswa yang berbasis di kampus, ketimbang menghadapi ancaman kekuatan rakyat. Pemerintah pun sadar bahwa kebijakan memperbolehkan berdirinya SMPT bagaikan "pedang bermata dua." Bila aktivis mahasiswa cerdas, SMPT bisa digunakan sebagai organisasi legal di kampus untuk memo-

bilisasi dan mengorganisasi massa mahasiswa. Sejarah cenderung berulang, meskipun dalam nuansa yang berbeda. Gerakan mahasiswa paska NKK belum menyedjarah, karena momentumnya belum tiba. Saatnya kelak dapat diuji sejauh mana keberpihakan mahasiswa dan ketepatan pilihan metodologis mereka dalam melakukan perubahan. Dewasa ini terlihat beberapa prasyarat kondisi obyektif seperti konflik internal di kalangan elite dan mencuatnya beberapa problem ekonomi, antara lain utang luar negeri, kesenjangan sosial, monopoli dan korupsi. Persoalannya, di kalangan mahasiswa dan oposisi belum terbentuk organisasi dan isu yang dapat menjembatani dan menjadi pemicu. Usaha ke arah itu tampaknya perlu dirintis.●



Menyorot Gejolak Sosial Keislaman Indonesia



Islam telah menanamkan seperangkat nilai yang menjadi etos masyarakat Indonesia, menerobos batas etnis dan lokal.

Bagaimana corak ketegangan Islam sebagai kultur dan masyarakat sebagai struktur? Pakar terkemuka, Prof. Dr. Taufik Abdullah menyorot soal Islam dan negara, tradisi politik dan kepemimpinan Islam, politik tradisional vs reformis; dinamika eksternal pesantren; Islam di Aceh, Minangkabau dan Palembang; dan lain-lain.

Kedudukan Islam telah turut membentuk Sejarah Indonesia. Bacalah buku ini, sebuah catatan sejarah, sekaligus apresiasi aktual ke depan tentang Islam dan masyarakat Indonesia.

ISLAM DAN MASYARAKAT
Pantulan Sejarah Indonesia
Taufik Abdullah
292 hal., Rp 11.000,-

Dapatkan di toko buku kota Anda. Pesanan langsung disertai ongkos kirim 10% (minimum Rp 2.000,-) ke:

PT Pustaka LP3ES Indonesia
Jl. S. Parman 81, Jakarta 11420
Telp. : 5663527, Fax. : 5683785